

ABSTRAK

Instrumen Efek Beragun Aset merupakan salah satu produk pasar modal yang berkembang di Indonesia sebagai sarana pembiayaan dan diversifikasi investasi. Namun, kompleksitas struktur kontraktual serta penggunaan perjanjian baku dalam penerbitannya berpotensi menempatkan investor ritel pada posisi yang lemah secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap perlindungan investor ritel dalam instrumen Efek Beragun Aset di Indonesia ditinjau dari prinsip keadilan kontraktual, penerapan prinsip tersebut dalam hubungan hukum para pihak, serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang ideal guna mewujudkan keseimbangan kepentingan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum Efek Beragun Aset masih berorientasi pada kepastian hukum formal dan keterbukaan informasi, namun belum sepenuhnya menjamin keadilan kontraktual bagi investor ritel. Penerapan prinsip keadilan kontraktual dalam praktik masih belum optimal karena adanya ketimpangan posisi tawar, asimetri informasi, serta pembebanan risiko yang tidak proporsional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif dengan menempatkan keadilan kontraktual sebagai dasar utama, guna memberikan perlindungan yang seimbang bagi investor ritel sekaligus mendukung keberlanjutan pasar modal di Indonesia.

Kata Kunci: perlindungan investor ritel; efek beragun aset; keadilan kontraktual

ABSTRACT

Asset-Backed Securities constitute one of the capital market instruments that have developed in Indonesia as a means of financing and investment diversification. However, the complexity of contractual structures and the extensive use of standard-form contracts in their issuance potentially place retail investors in a legally vulnerable position. This study aims to analyze the legal framework governing the protection of retail investors in Asset-Backed Securities in Indonesia from the perspective of contractual justice, examine the application of this principle in the legal relationships among the involved parties, and formulate an ideal model of legal protection to achieve a balance of interests. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the current regulation of Asset-Backed Securities primarily emphasizes formal legal certainty and disclosure obligations, yet has not fully ensured contractual justice for retail investors. The application of contractual justice in practice remains suboptimal due to unequal bargaining positions, information asymmetry, and disproportionate risk allocation. Therefore, strengthening both preventive and repressive legal protection by positioning contractual justice as a fundamental principle is necessary to provide balanced protection for retail investors and to support the sustainability of Indonesia's capital market.

Keywords: retail investor protection; asset-backed securities; contractual justice